



Rencana Tata Guna Lahan Partisipatif Desa Jolotigo (Participatory Land Use Planning)

Program Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat
Dalam Beradaptasi Perubahan Iklim
Di Desa Jolotigo Kabupaten Pekalongan
November 2021

Kerja sama:
Earthworm Foundation Indonesia-Mercy Corps Indonesia,
Pemerintah Desa Jolotigo dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan



Earthworm
Mercy Corps Indonesia



KATA PENGANTAR

Desa Jolotigo adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Wilayah dapat dikatakan tidak mengalami perubahan *landscape* yang cukup berarti. Namun perubahan terjadi dikarenakan oleh konversi lahan yang semula dari sawah menjadi lahan perkebunan ataupun ladang. Degradasi lahan juga terjadi antara lain karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terjadi selama ini.

Di Jolotigo juga terjadi konversi pada kawasan hutan yang ditebang untuk menanam tanaman pangan. Situasi ini didorong karena menurunnya kesuburan lahan di wilayah tanah Dukuh Pemajekan. Dan saat ini sebagian besar konversi lahan hutan ini berupa tanaman keras seperti tanaman kopi, cengkeh dan lain sebagainya.

Dalam upaya membangun kapasitas resiliensi masyarakat terdampak perubahan iklim, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi dengan memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya. Perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (PLUP), merupakan sebuah upaya masyarakat dan *stakeholder* lokal dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa/wilayahnya.

PLUP ini menjadi inisiatif bersama antara Mercy Corp Indonesia, Earthworm Foundation Indonesia, dan Pemerintah Kab/Kota Pekalongan, bersama Kelurahan dan Desa-desa terpilih. PLUP ini adalah pendekatan sekaligus metode yang dapat membantu masyarakat dalam menyajikan gagasan perencanaan, memetakan kapasitas wilayahnya, menganalisis situasi wilayahnya, hingga merumuskan strategi dan program meningkatkan kapasitas resiliensi dan *livelihood*-nya secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Penyusun sangat terbuka pada semua pihak atas masukan dari laporan ini, semoga dokumen ini menjadi pertimbangan para pihak dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat di Desa Jolotigo dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pekalongan, November 2021

Tim Penyusun

SAMBUTAN KADES JOLOTIGO



Assalamu 'alaikum wr. wb.

Petani Desa Jolotigo, silahkan yang mempunyai unek-unek bisa diungkapkan. Intinya Desa Jolotigo itu sebagian besar potensinya adalah kopi dan cengkeh. Bagaimana agar harga kopi bisa lebih baik, atau bagaimana agar kopi dan cengkeh itu bisa mempunyai nilai yang lebih baik, silahkan dipikirkan bersama.

Saya juga menyampaikan kepada tim, untuk mempunyai program yang menghubungkan dua komoditas ini dengan pasar agar mempunyai harga yang lebih baik. Jolotigo belum punya penggiling kopi dengan standar yang baik. Adapun yang sudah terjadi selama ini menggiling kopi dengan menggunakan penggiling padi sehingga kopi rusak.

Semoga dalam adanya program ini mudah-mudahan ada solusi supaya dapat penggilingan kopi basah juga rismil penggilingan kopi kering, dan dengan tata waktu perwujudan yang tidak terlalu lama.

Warga peserta diskusi harus bisa memberikan gambaran tentang kondisi budidaya serta perlakuan paska panen komoditas kopi. Bagaimana supaya produksi dan pemasaran kopi dan apakah tim punya informasi, terimakasih.

Jolotigo, Nopember 2021

Taruno
(Kepala Desa Jolotigo)

SAMBUTAN STAF PROGRAM EFI-MCI

Kami EFI dan MCI berkolaborasi dalam rangka menghadapi tantangan pada isu-isu lingkungan, terutama yang disebabkan oleh perubahan iklim, dampak perubahan iklim itu tidak langsung kita rasakan, iklim itu sangat berpengaruh bagi beberapa sektor, salah satu sektor yang paling berpengaruh adalah sektor pertanian.

Dari situ kami memahami bahwa fisiologi tanaman berubah, karena faktor perubahan iklim yang masyarakat tidak pahami. Hal ini yang akan kita diskusikan bersama, supaya dampak perubahan iklim ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi masyarakat.

Selain itu, kita juga berfikir bagaimana tidak hanya pemasalahan produksi tapi juga pasca produksinya ke arah pemasarannya, jangan sampai karena kita “*cuek*” terhadap perubahan iklim kita sudah terlambat menyadarinya, karena perubahan iklim ini prosesnya lambat jadi tidak langsung.

Karena hari ini baru proses awal, kita berdiskusi bersama apa yang akan kita lakukan apa yang bapak ibu bisa lakukan apa yang kami bisa lakukan kita diskusikan bersama.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Desa Jolotigo dilihat dari keseluruhan *landscape* Kabupaten/Kota Pekalongan berada di wilayah tengah. Dengan ketinggian antara 700-900 mdpl, membuat Jolotigo seperti wilayah *buffer* antara daerah bergunung dengan daerah datar sampai tepi pantai.

Kondisi geografis Jolotigo ini memungkinkan wilayah ini lebih punya pengaruh ke wilayah dataran dibandingkan dengan pegunungan. Sehingga perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di Desa Jolotigo akan lebih dirasakan pada desa-desa di bawahnya.

Berdasarkan hasil penilaian wilayah secara cepat (RRA) di Desa Jolotigo Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan hasilnya memperkuat pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa dampak perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan masyarakat. Selain itu, bahwa kerentanan yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor kesadaran dan kapasitas masyarakat, kelembagaan sosial hingga faktor implementasi kebijakan pembangunan daerah yang dinilai masyarakat belum maksimal.

Ditemukan juga isu-isu masalah tentang meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, kesadaran budidaya pertanian yang ramah lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan akses kesehatan, aksesibilitas dan jaringan jalan, lemahnya kelembagaan tani serta soal kebijakan pemerintah daerah yang (dinilai) belum optimal.

Tujuan kegiatan penyelenggaraan perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) yaitu: (i) Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa/kelurahan, (ii) Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program strategis berbasis potensi desa/kelurahan, (iii) Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas resiliensi dan *livelihood* masyarakat.

Dari penyelenggaraan workshop PLUP ini diperoleh hasil sebagai berikut:

- Rumusan visi: Jolotigo maju, jaya, bisa, bersatu.
- Sumberdaya alam (SDA) yang sensitif terdampak adalah semua jenis sumberdaya yang berasal dari proses alamiah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu sungai (Sumilir, Jolotigo, Kaliguwo, Kaliurang, Ngedok), hutan, sawah, ladang, dan air terjun.
- Secara detail arahan pengelolaan untuk masing-masing jenis sumberdaya alam tersebut adalah 3 jenis sumberdaya alam diarahkan pada fungsi lindung/pemanfaatan terbatas, yang mencakup, sungai, hutan dan air terjun. Sementara 2 jenis sumberdaya alam lainnya untuk fungsi budidaya, yakni sawah dan ladang.

Dari hasil diskusi partisipatif yang melibatkan berbagai pihak menghasilkan 4 Isu strategis antara lain yaitu:

1. Terbatasnya jaringan pemasaran
2. Kurangnya pengetahuan tentang konservasi, pengetahuan dan ketrampilan budidaya pertanian dan peternakan
3. Kurangnya akses permodalan
4. Rendahnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah

Dalam PLUP dihasilkan pula Tim Penggerak yang bertanggungjawab mengkoordinir atas arahan program strategis yang menjadi mitra di pemerintahan desa dan masyarakat dalam mempercepat pelaksanaan program strategis guna mewujudkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di Desa Jolotigo.

KREDIT

Narasumber/Partisipan	:	Taruno (Kades), Teguh Mujiono, Kusniati, Winarni, Siti Kustiyah, Titin Suyati, Eko Pawiti, Lulu Nisa, Nandinin, Darim, Pinggir, Wantoro, Tasuri, Casmad, Cahyo, Rasmanai, Rohmat, Mugi, Sugito, T. Slamet, Widiyanto, Casono, Wiyono, Nurudin, Dinggir Arisman, Dahuri, Pinggir Suroso, Sunadi, Arifin, MuslihinnMuttali
Kontributor & Pendukung Proses	:	Nofri Iswandi, Sigit Wijanarko, Arif Anshori, Emy Setya D, Okta Dwi F, Maun Kusnandar;
Notulen	:	Bagus
Dokumentasi	:	Cholisul Marom
Fasilitator	:	M. Khulwani (Fasilitator Utama); Ma'un Kusnandar, Indayati
Sumber Peta	:	Peta Penutup Lahan LHK 2020, BIG dan Hasil olahan survei lapangan.
Program dan Kerja sama	:	Program Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan; Kerja sama EFI-MCI Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
SAMBUTAN KADES JOLOTIGO	II
SAMBUTAN STAF PROGRAM EFI-MCI	III
RINGKASAN EKSEKUTIF	IV
KREDIT	VI
DAFTAR ISI	VII
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Kerangka Konseptual	2
3. Tujuan dan Keluaran	7
4. Metode	8
5. Alur Proses Workshop PLUP	9
BAB II GAMBARAN UMUM DESA JOLOTIGO	12
1. Geografi, Demografi dan Letak Administrasi	12
2. Aksesibilitas Wilayah	14
3. Struktur Pemerintah Desa Jolotigo	14
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP	15
1. Visi PLUP Jolotigo	15
2. Aset Wilayah Jolotigo	16
3. Perubahan Tata Guna Lahan Desa Jolotigo	23
4. Permasalahan dan Isu Strategis Desa Jolotigo	24
BAB IV ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN	27
1. Zonasi Pengelolaan Wilayah Jolotigo	27
2. Arah Strategis Pengembangan Wilayah Jolotigo	28
BAB V PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH	30
Program Strategis Pengembangan Desa Jolotigo	30
Program Prioritas	33
Program Yang Telah Dilakukan di Desa Jolotigo	34
Tim Penggerak Hasil PLUP	35
LAMPIRAN	36

Daftar Tabel

Tabel 1. Penggunaan lahan Desa Jolotigo.....	13
Tabel 2. MimpI masyarakat Desa Jolotigo berdasarkan FGD PLUP Tahun 2021	16
Tabel 3. Sumberdaya Alam Desa Jolotigo.....	16
Tabel 4. Sumberdaya Manusia Desa Jolotigo.....	18
Tabel 5. Sumberdaya Buatan Desa Jolotigo	18
Tabel 6. Jenis Modal Sosial (MDS) Masyarakat Desa Jolotigo	19
Tabel 7. Jenis Komoditas (SDE) yang diusahakan masyarakat Desa Jolotigo	20
Tabel 8. Jenis Pengeluaran Kebutuhan Pokok Masyarakat Desa Jolotigo	21
Tabel 9. Perubahan Sumber Daya Alam.....	23
Tabel 10. Isu Strategis dan Skoring.....	26
Tabel 11. Program Prioritas Tahun Pertama Desa Jolotigo.....	33
Tabel 12. Program Inisiasi Masyarakat Desa	34

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram bagan alir tahapan proses fasilitasi workshop PLUP	9
Gambar 2. Peta Tata Guna Lahan Desa Jolotigo	13
Gambar 3. Struktur Pemerintah Desa Jolotigo	14
Gambar 4. Sketsa pemanfaatan ruang wilayah Desa Jolotigo.....	15
Gambar 5. Peta SDA sensitif terhadap perubahan iklim Desa Jolotigo	17
Gambar 6. Peta Perubahan Penutupan Lahan Desa Jolotigo.....	23
Gambar 7. Diagram Akar Masalah Desa Jolotigo	26
Gambar 8. Peta Zonasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Desa Jolotigo	28
Gambar 9. Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Jolotigo.....	29
Gambar 10. Struktur Tim Inisiator Desa Jolotigo	35

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa Jolotigo apabila dilihat dari keseluruhan landscape Kabupaten/Kota Pekalongan berada di wilayah tengah. Dengan ketinggian antara 700-900 mdpl, membuat Jolotigo seperti wilayah *buffer* antara daerah bergunung dengan daerah dibawahnya. Kondisi geografis Jolotigo ini memungkinkan wilayah ini lebih punya pengaruh ke wilayah dataran dibandingkan dengan pegunungan.

Sehingga perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di Desa Jolotigo akan lebih dirasakan pada desa-desa di bawahnya. Kondisi ketinggian Jolotigo menyebabkan berbagai jenis tanaman yang ada di wilayah ini berbeda dibandingkan dengan yang ada di Kecamatan Petungkriyono. Wilayah ini banyak memberikan kontribusi terhadap tanaman pangan dan peternakan, serta jenis tanaman perkebunan semisal kopi, cengkeh, dan tanaman kayu lainnya.

Berdasarkan hasil penilaian wilayah secara cepat (RRA)¹ di Desa Jolotigo Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan hasilnya memperkuat pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa dampak perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan masyarakat. Kerentanan yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor kesadaran dan kapasitas masyarakat, kelembagaan sosial hingga faktor implementasi kebijakan pembangunan daerah yang dinilai masyarakat belum maksimal.

Situasi ini menunjukkan bahwa untuk membangun kapasitas resiliensi masyarakat (hulu-hilir) dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi (isu) hulu-hilir, memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya.

Proses penyusunan perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (PLUP), adalah upaya dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa/kelurahan guna memperkuat kapasitas resiliensi masyarakat guna merespon perubahan iklim yang semakin tidak menentu, sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terwujud.

¹ Earthworm Foundation Indonesia, September 2021

2. Kerangka Konseptual

1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS RESILIENSI

Istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sudah cukup populer sejak tahun 70-an, dengan berbagai ragam penyebutan istilah dan terminologinya. PBB mengartikan pembangunan masyarakat, sebagai proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Suharyanto dalam teori pembangunan masyarakat desa (*Rural Community Development*) merujuk pada upaya perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang secara umum menggantungkan hidupnya dari pengelolaan sumberdaya alam.

Keberhasilan pembangunan disamping memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi (yang tinggi) juga memperhatikan pada keberlanjutan yang di dalamnya menyaratkan pada tidak terjadinya dan bertambahnya kesenjangan sosial (alienasi dan dehumanisasi) serta tidak dilakukannya perusakan terhadap sumberdaya alam.

Resiliensi sebagai konsep pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, meminimalkan, menghilangkan, bahkan mencegah (potensi) dampak dan risiko yang (berpotensi) merugikan keberlanjutan hidupnya, sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Dalam konteks program adaptasi perubahan iklim, resiliensi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan kelompok petani/masyarakat yang rentan (potensi) terpapar terhadap perubahan iklim yang terjadi, sehingga mampu menganggulangi permasalahan yang terjadi dan dapat beradaptasi atas situasi perubahan-perubahan (lingkungan), dan masyarakat tetap dapat memenuhi *livelihood*-nya secara berkelanjutan.

Dalam membangun resiliensi komunitas tidak dapat dilepaskan dengan konsep pengembangan masyarakat. Indikator komunitas resilien, seperti (i) mempunyai kepercayaan diri dan motivasi yang kuat; (ii) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis mendayagunakan SDA/lahannya dengan baik; (iii) Mempunyai aset lahan yang produktif dengan kepastian legalitas penguasaan; (iv) Pendapatan yang cukup; (v) Dukungan kelembagaan sosial yang memadai; (vi) Mempunyai akses informasi yang

mudah, jaringan pasar serta akses permodalan serta dukungan kemitraan; dan (vii) adanya dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak; adalah indikator-indikator yang penanda bahwa komunitas tersebut resilien.

Dalam konsep resiliensi, EF Indonesia menggunakan 3 (tiga) jenjang sasaran, yakni, sasaran primer, sasaran sekunder, dan sasaran tersier. Sasaran primer, fokus pada upaya memperkuat kapasitas individu yang mencakup kepercayaan diri², motivasi³ dan kapasitas individu⁴. Sasaran sekunder fokus pada penguatan kelompok dan kelembagaan yang mengurus kelompok masyarakat, dalam hal ini yang mata pencahariannya sensitif terhadap dampak perubahan iklim; misalnya kelompok petani secara umum⁵, sementara sasaran tersier fokus pada kemampuan kelompok masyarakat dalam mendorong kebijakan pemerintah agar mendukung (pemecahan masalah dan pencapaian tujuan) kelompok masyarakat⁶.

Ketiga sasaran ini mesti dipenuhi untuk mewujudkan keberdayaan dan kapasitas resiliensi sehingga terwujud masyarakat yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2 Ego merupakan identitas dan karakter pribadi sebagai petani, sehingga mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sesuatu baik potensi atau yang manifest yang melekat pada individu petani.

3 "Mengungkit" dorongan berubah dari diri petani untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini membangkitkan rasa kepercayaan diri untuk berubah guna mencapai suatu tujuan hidup petani baik sebagai individu atau sebagai anggota rumah tangga petani (intrinsik dan ekstrinsik).

4 Pengetahuan dan ketrampilan serta sikap petani, dengan mendorong peningkatan kapasitas berupa pengetahuan dan ketrampilan produksi agar mampu mendayagunakan sumberdaya alam dan lahan yang dimiliki dan/atau dikuasainya agar menjadi produktif, optimal, berdaya guna dan multi guna sehingga mendukung livelihood diri dan keluarganya

5 Termasuk kapasitas organisasi dalam berjejaring dan bermitra baik ditingkat komunitas sendiri maupun dengan jaringan pasar yang lebih luas

6 Kapasitas dalam mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung petani dan sector pertanian, seperti kebijakan pengolahan, agroindustri, kebijakan perdagangan (trade policy), seperti perlindungan produk petani, perlindungan harga jual, akses permodalan dan pemasaran dan lain-lain.

2. PENDEKATAN DAN PRINSIP MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN

Gagasan dan konsep penghidupan yang layak, Mata Pencapaian Berkelanjutan (*sustainable livelihood*) tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Robert Chambers di pertengahan 1980-an, yang kemudian dikembangkan oleh Chambers, Conway, dan para ahli yang lain di awal tahun 1990-an. Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh banyak lembaga internasional sebagai alternatif pendekatan pembangunan pada awal 1990-an yang dipicu dari maraknya kasus kelaparan dan kerawanan pangan di sejumlah negara pada tahun 1980-an⁷

Chambers dan Conway dalam "*Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century*" (1991:i) memaknai *livelihood* sebagai orang-orang dengan kemampuan dan cara hidup mereka yang didalamnya termasuk juga makanan, pendapatan dan aset (baik *tangible assets* berupa sumberdaya dan perbekalan, maupun *intangible assets* berupa klaim dan akses).

Ashley dan Carney, dalam "*Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience*" (1999) mengemukakan prinsip-prinsip *sustainable livelihood* (Mata Pencapaian Berkelanjutan) sebagai berikut: Bahwa dalam kegiatan pembangunan yang fokus pada kemiskinan harus:

- Berpusat pada manusia/masyarakat (*people-centered*). Bahwa upaya mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan akan tercapai hanya jika ada dukungan eksternal yang fokus pada apa yang penting bagi orang-orang, memahami perbedaan antara kelompok orang dan bekerja dengan mereka dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi penghidupan mereka saat ini, lingkungan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan.
- Responsif dan Partisipatif. Bahwa dalam pendekatan *sustainable livelihood* (Mata Pencapaian Berkelanjutan), suatu intervensi yang dilakukan adalah respon atas situasi/problem yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Partisipatif merujuk pada menempatkan orang miskin itu sendiri-lah yang harus menjadi aktor kunci dalam mengidentifikasi dan mengatasi prioritas penghidupan. Orang luar harus terlibat dalam proses yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan dan menanggapi orang miskin.

⁷ Haidar, "Sustainable Livelihood Approach: The Framework, Lessons Learnt from Practice and Policy Recommendations," 2009)

- Multilevel. Bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang saling terkait dan bertingkat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. Memastikan bahwa kegiatan di tingkat mikro dapat memberikan informasi pada penyusun kebijakan yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang efektif. Struktur dan proses di tingkat makro juga mendukung masyarakat untuk membangun kekuatan mereka sendiri.
- Kemitraan. Bahwa mengingat isu kemiskinan banyak faktor yang mempengaruhi, maka diperlukan kemitraan dan pelibatsertaan para pihak, baik dari sektor publik (pemerintah), *private* (Perusahaan) hingga *civil society* (akademisi, LSM)
- Berkelanjutan. Bahwa upaya mewujudkan keberlanjutan *livelihood* masyarakat, perlu menyelaraskan antara aspek ekonomi, sosial (termasuk kelembagaan komunitas) dan ketersediaan sumberdaya alam secara lintas generasi.

3. ASET PENTAGONAL: KOMPONEN MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN

Merujuk pada konsep dan definisi tentang *sustainable livelihood* (Mata Pencaharian Berkelanjutan) yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway, yang antara lain menitikberatkan pada aspek kemampuan, aset (*tangible* dan *intangible*), akses, dan pendapatan, yang oleh DFID dikembangkan menjadi kerangka kerja *livelihood*. Kerangka kerja *livelihood* ini mengidentifikasi 5 (lima) kategori aset utama yang selanjutnya disebut juga sebagai 5 (lima) modal sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Kelima modal tersebut adalah: (i) Modal Sumberdaya Alam; (ii) Modal Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat (*Human Capital*); (iii) Sumberdaya Kelembagaan Komunitas/Masyarakat (*Social Capitals*); (iv) Modal Fisik (Buatan) (Sarana dan Prasarana serta Jaringan) (*Infrastructures and Utilities*); dan (v) Sumberdaya Ekonomi dan Keuangan Masyarakat (*Economic and Financial Capitals*)⁸. Kelima aset tersebut, satu dengan lainnya saling terkait, dan menjadi faktor pengaruh kualitas *livelihood* suatu masyarakat.

⁸ DFID, 1999

4. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG & PLUP.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah harus memperhatikan pola ruang, yakni kebijakan pembangunan yang menjaga keseimbangan antara fungsi budidaya dan lindung. Lebih lanjut dalam UU ini disebutkan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam peraturan ini merentang dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang ini diatur sedemikian rupa dalam pasal 65, bahwa: (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat; (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: (a) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; (b) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat ini selaras dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana desa saat ini perlu menjadi garda depan dalam proses pembangunan wilayah desa. Paradigma dari “membangun desa” menjadi “desa membangun” menyaratkan kesiapan aparatur pemerintahan desa berserta kelembagaannya dan partisipasi aktif masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijak dan arif, dari pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, modal sosial hingga sumberdaya ekonominya, sebagai modal masyarakat/pemerintahan desa untuk memajukan daerahnya dan memakmurkan masyarakat disekitarnya.

Untuk menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan kawasan perdesaan, maka diperlukan kebijakan yang mendukung keserasian dan keseimbangan fungsi ruang (budidaya dan lindung). Untuk mewujudkan agenda tersebut, dibutuhkan inisiasi perencanaan pengelolaan sumberdaya alam/kawasan hutan yang terintegrasi, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya alamnya secara lintas generasi.

Participatory Land Use Planning (PLUP) atau perencanaan tata guna lahan secara partisipatif konsep perencanaan tata guna lahan pada satuan wilayah yang diselenggarakan secara partisipatif guna merumuskan arahan pengelolaan sumberdaya alam/lahan sesuai dengan peruntukannya, guna mewujudkan keserasian pengelolaan fungsi dan mendukung resiliensi dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Kegiatan perencanaan tata guna lahan ini diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya alam (perdesaan) dengan melibatkan pemangku kepentingan atas Sumberdaya yang dipetakan secara partisipatif khususnya masyarakat yang tinggal dalam wilayah yang bersangkutan.

Dalam proses penyelenggaraan workshop PLUP, peran orang luar sebagai fasilitator, yang membantu masyarakat/*stakeholder* mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian, sementara masyarakat sebagai narasumbernya.

Metode Diskusi kelompok terfokus (FGD), *check* dan *recheck* hasil FGD dilakukan melalui pleno, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok lain sehingga menghasilkan data yang berkeandalan.

3. Tujuan dan Keluaran

Tujuan kegiatan penyelenggaraan perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah:

1. Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa/kelurahan.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program strategis berbasis potensi desa/kelurahan.
3. Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas resiliensi dan *livelihood* masyarakat

Sementara keluaran dari kegiatan PLUP ini adalah:

1. Dokumen rencana pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif pada skala desa/kelurahan.
2. Arahan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan desa/komunitas yang memperkuat kapasitas wilayah dalam merespon dampak perubahan iklim.
3. Program prioritas dan program alternatif pengembangan usaha komunitas yang memperkuat resiliensi dan *livelihood* masyarakat.

4. Metode

Sebelum workshop PLUP, beberapa kegiatan penilaian wilayah telah dilakukan, antara lain:

- *Desktop study*, dilakukan dengan melakukan kajian data pustaka dan analisis data citra satelit dari tutupan lahan (*land cover*) wilayah desa dan/atau kecamatan dalam bentang alam wilayah kabupaten.
- *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, dilakukan wawancara, observasi wilayah, diskusi dan konsultasi hasil olahan peta (*desktop study*) kepada pemangku kepentingan dan narasumber relevan⁹.

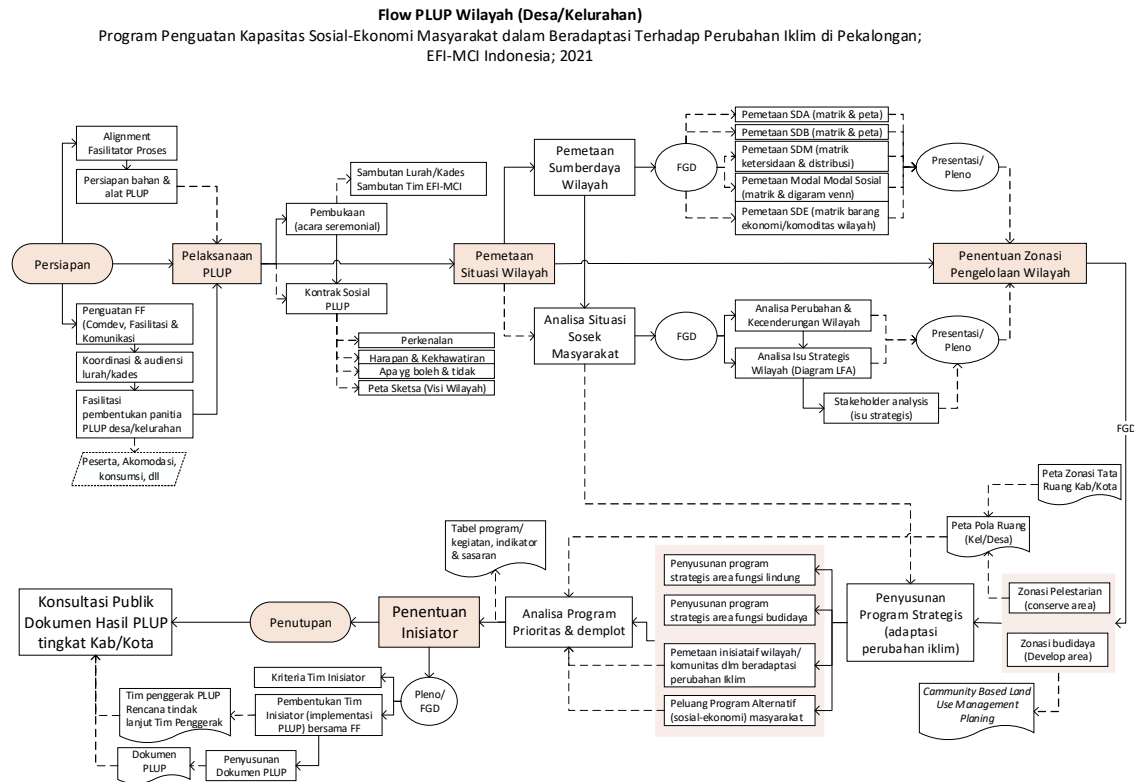
Sementara saat fasilitasi workshop PLUP, metode yang digunakan antara lain:

- Kontrak sosial, yakni upaya membangun kesepakatan dan kesepahaman atas perlu/tidaknya diselenggarakannya workshop, dengan tetap menggunakan persetujuan awal dari pemerintahan desa dan masyarakat/desa (dengan prinsip FPIC).
- PRA (*Participatory Rural Appraisal*), yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya desa bersama masyarakat/kelompok masyarakat.
- Diskusi Kelompok Terfokus (FGD); dalam proses fasilitasi PLUP, peran orang luar adalah sebagai fasilitator, membantu mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian dengan masyarakat sebagai narasumber, sekaligus pelaku proses pengkajian dan pelaksana keputusan yang dihasilkan. Dalam proses FGD dilakukan pula *check* dan *recheck* hasil FGD melalui pleno kelompok dan antar kelompok diskusi, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok lainnya.
- Bahan dan Peralatan (*tools*); perlengkapan yang digunakan dalam proses fasilitasi workshop PLUP ini antara lain: (i) Peta dasar *land use* desa; (ii) ATK, berupa kertas plano, selotip kertas, spidol warna dan *metacard* (potongan kertas ukuran tertentu untuk mendokumentasikan gagasan masyarakat).
- Dokumentasi, hasil fasilitasi proses workshop dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan komunitas yang menjadi pegangan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang relevan.
- Konsultasi publik, yakni sebuah metode menyampaikan isi dokumen hasil dari workshop PLUP kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan *feedback*, respon dan koreksi (jika diperlukan) serta untuk mengembangkan program kemitraan/kerja sama (kolaborasi) lebih lanjut.

⁹ Dalam kajian data primer ini, dilakukan pula Field Diagnostic, sebuah metode diagnosis untuk menilai perspsi masyarakat terkait situasi wilayahnya, terkait dengan livelihood dan resiliensi rumah tangga petani.

5. Alur Proses Workshop PLUP

Berikut adalah diagram proses fasilitasi workshop PLUP (*Participatory Landuse Planing*).



Gambar 1. Diagram bagan alir tahapan proses fasilitasi workshop PLUP

Berikut adalah keterangan bagan alir proses fasilitasi workshop PLUP:

Persiapan, mencakup:

- Penguatan kapasitas fasilitator lapangan (Field Facilitators) terkait pengembangan masyarakat, pendekatan partisipatif, teknik fasilitasi partisipatif dan komunikasi.
- Audiensi dan presentasi kepada stakeholder kunci (kelurahan/desa)
- Fasilitasi diskusi pembentukan tim pelaksana PLUP tingkat kelurahan/desa bersama pemerintah kelurahan/desa.
- Identifikasi dan penentuan calon partisipan, penentuan tempat, konsumsi, perlengkapan termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses workshop PLUP.

Pelaksanaan, rangkaian acara proses workshop PLUP meliputi:

- Pembukaan, pembukaan acara workshop dilakukan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari kepala desa/lurah dilanjutkan dengan sambutan dari wakil Tim EFI-MCI.

Kontrak sosial, proses ini mencakup:

- Perkenalan, yakni proses membangun keakraban dan saling mengenal antar partisipan dan antar fasilitator dan partisipan.
- Diskusi kelompok terfokus, yang mencakup: (i) diskusi kelompok harapan dan kekhawatiran; (ii) diskusi kelompok aturan proses (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses diskusi; (iii) diskusi kelompok waktu, yakni kelompok yang membahas jadwal/tata waktu selama kegiatan workshop PLUP; dan (iv) diskusi kelompok peta skatsa visi, yakni kelompok yang membahas peta sketsa visi desa/kelurahan.

Pemetaan potensi wilayah, mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya alam (SDA);
- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya manusia (SDM), terutama tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan masyarakat;
- Diskusi kelompok pemetaan jenis sarana dan prasarana wilayah (sumberdaya buatan/SDB);
- Diskusi kelompok jenis sumberdaya sosial/kelembagaan masyarakat (sumberdaya sosial/SDS), termasuk kelompok/lembaga masyarakat, formal atau nonformal; dan
- Diskusi kelompok jenis sumberdaya ekonomi (SDE), yang meliputi jenis komoditas yang dihasilkan (produksi) dan dijual masyarakat, termasuk lembaga keuangan yang diakses masyarakat.

Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator.

Pemetaan dan analisis masalah wilayah, dalam proses ini, yang dilakukan adalah:

- Diskusi kelompok perubahan dan kecenderungan wilayah desa/kelurahan dengan merujuk pada jenis SDA penting dan sensitive terhadap perubahan iklim.
- Diskusi kelompok identifikasi masalah dan analisis isu strategis wilayah
- Diskusi kelompok analisa para pemangku kepentingan atas isu strategis wilayah

Penentuan/pemetaan zonasi pengelolaan wilayah (FGD), mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi perlindungan

- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi budidaya

Penyusunan program startegis wilayah, yang mencakup:

- Diskusi kelompok program startegis pada zona lindung
- Diskusi kelompok program strategis pada zona budidaya
- Diskusi kelompok program strategis terkait dengan livelihood masyarakat dan kebijakan yang mendukung adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim
- Diskusi kelompok analisa program prioritas demplot
- Diskusi kelompok identifikasi inisiatif masyarakat yang sudah dilakukan
- Diskusi kelompok penentuan program prioritas untuk satu tahun kedepan

Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator

Penentuan Tim Penggerak (inisiator PLUP), tahapan yang dilakukan antara lain:

- Diskusi penentuan kriteria anggota tim penggerak;
- Diskusi pemilihan anggota tim penggerak dan penyusunan rencana tindak lanjut (termasuk penyusunan dokumen PLUP untuk pelaksanaan konsultasi publik)

Penutup (doa dan foto bersama)

BAB II GAMBARAN UMUM DESA JOLOTIGO

1. Geografi, Demografi dan Letak Administrasi

1. KONDISI GEOGRAFIS JOLOTIGO

Desa Jolotigo termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Secara Geografis Desa Jolotigo terletak di antara 7°04'36.1"S-109°44'35.1"E (*google earth*) dengan ketinggian wilayahnya diantara 700-900 Mdpl.

2. DEMOGRAFI JOLOTIGO

Jumlah penduduk Desa Jolotigo sebanyak 8.264 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 4.077 Jiwa dan perempuan sebanyak 4.187 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Desa Jolotigo 2.525 KK. Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Jolotigo jumlah penduduk miskin di desa pada tahun 2020 sebanyak 1.936 KK/RTM. Pekerjaan utama masyarakat Desa Jolotigo adalah petani, buruh tani, buruh pabrik, wiraswasta, pedagang, pensiunan/PNS, dsb (lain-lain).

3. LETAK ADMISITRASI JOLOTIGO

Secara Administratif Desa Jolotigo berbatasan dengan beberapa desa lain yaitu:

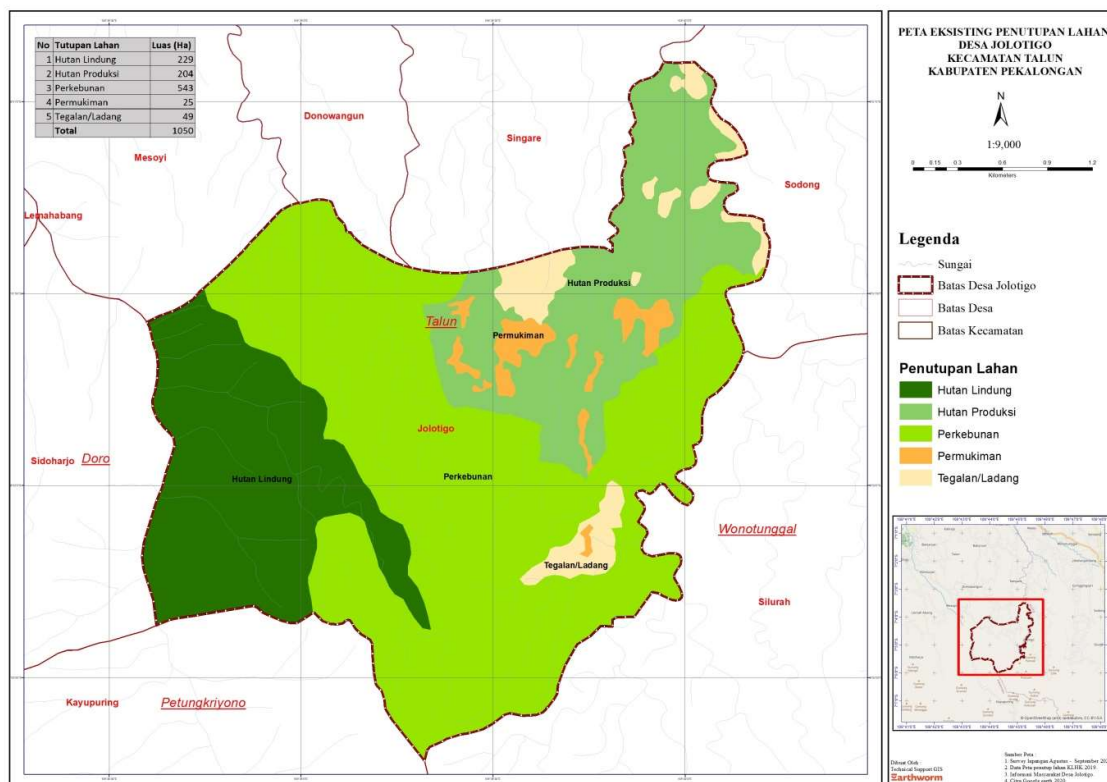
Sebelah Timur	: Desa Silurah (Kabupaten Batang)
Sebelah Selatan	: Jolotigo
Sebelah Utara	: Desa Singare
Sebelah Barat	: Desa Talun

4. PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH

Bardasarkan hasil analisis yang bersumber dari data survey lapangan, data peta tutupan lahan KLHK 2019, Informasi narasumber, dan citra satelit tahun 2020 dihasilkan bahwa jenis tata guna lahan di Desa Jolotigo dibagi dalam 5 (lima) jenis penggunaan lahan. Pembagian penggunaan lahan di Desa Jolotigo diantaranya adalah hutan lindung, hutan produksi, perkebunan, permukiman dan tegalan/ladang. Penggunaan lahan di Desa Jolotigo sebagian besar adalah perkebunan dengan luas 543 ha. Kemudian hutan lindung 229 ha, hutan produksi 204 ha, permukiman 25 ha da untuk tegalan/ladang seluas 49 ha. Berikut adalah tabel penggunaan lahan Desa Jolotigo.

Tabel 1. Penggunaan lahan Desa Jolotigo

No	Jenis Tata Guna Lahan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	229
2	Hutan produksi	204
3	Perkebunan	543
4	Pemukiman	25
5	Tegalan/ladang	49



Gambar 2. Peta Tata Guna Lahan Desa Jolotigo

2. Aksesibilitas Wilayah

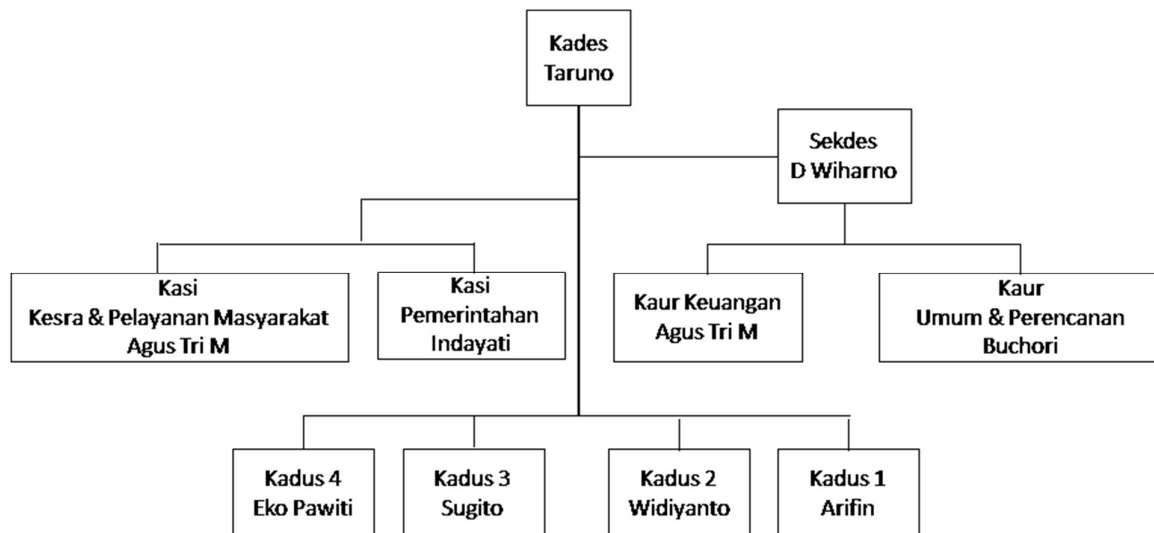
Jarak tempuh Desa Jolotigo dengan Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Keterbatasan angkutan umum menuju ibukota kecamatan, kabupaten dan provinsi tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin beragam.

Apabila dilihat dari aksesibilitasnya Desa Jolotigo memiliki tingkat kemudahan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jarak ke beberapa pusat-pusat pelayanan yaitu sebagai berikut:

- Jarak ke Pasar Doro Kecamatan Doro, sekitar 12 km.
- Jarak ke Kecamatan, sekitar 8 km, dengan waktu tempuh 30 menit
- Jarak ke Kabupaten Pekalongan/Kajen, sekitar 83 km,
- Jarak ke Provinsi Jawa Tengah/Semarang, 112 km

3. Struktur Pemerintah Desa Jolotigo

Berikut adalah Struktur Pemerintah Desa Jolotigo berdasarkan Peraturan Desa Jolotigo, Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.



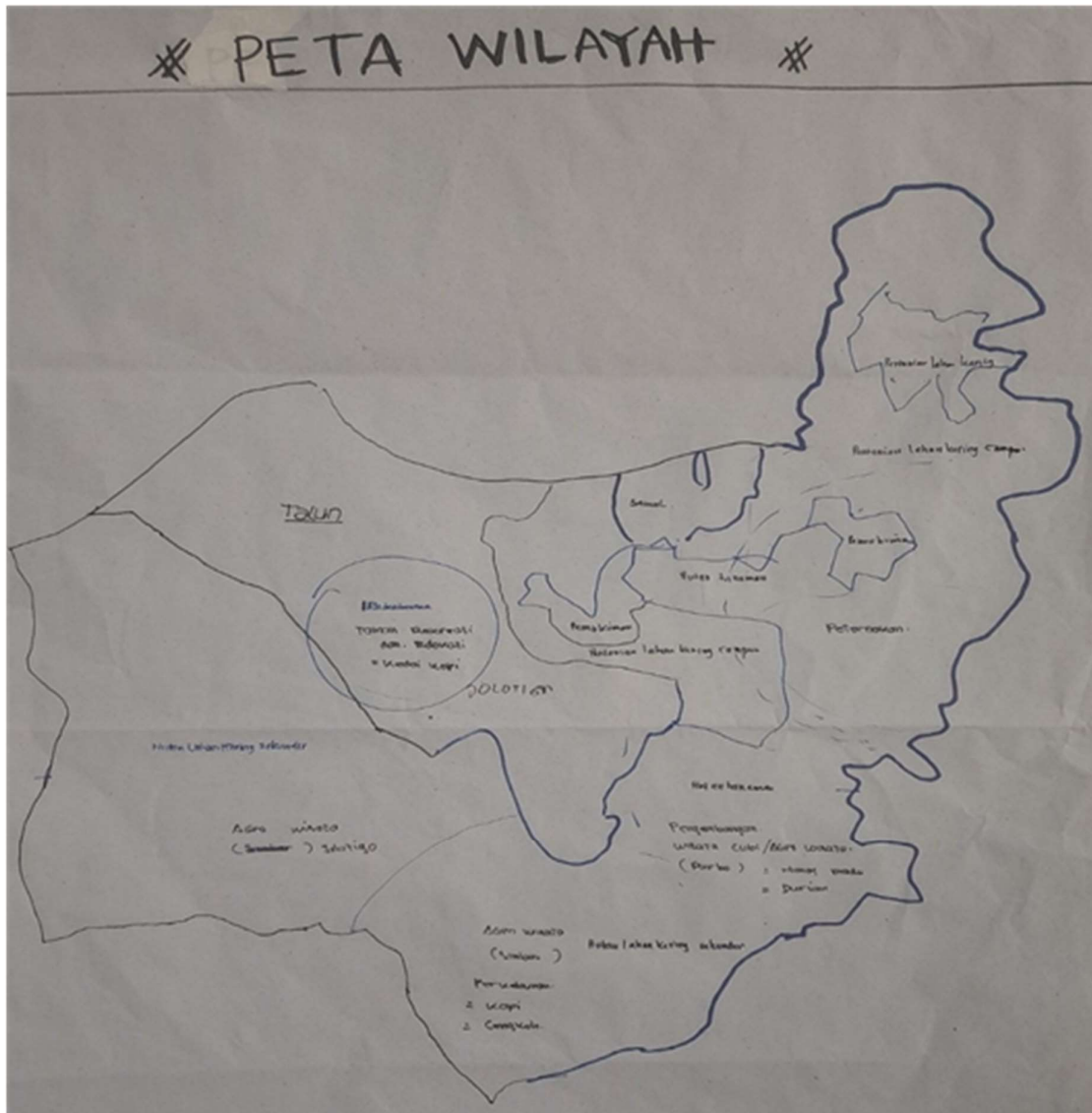
Gambar 3. Struktur Pemerintah Desa Jolotigo

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP

1. Visi PLUP Jolotigo

Hasil diskusi perumusan visi PLUP di Desa Jolotigo diperoleh rumusan visi yaitu: **“Jolotigo Maju, Jaya, Bisa, Bersatu”**

Visi tersebut oleh masyarakat Desa Jolotigo dituangkan dalam peta sketsa visi. Berikut adalah peta sketsa visi PLUP Desa Jolotigo dan tabel keterangannya:



Gambar 4. Sketsa pemanfaatan ruang wilayah Desa Jolotigo

Selain visi, masyarakat Desa Jolotigo juga memiliki harapan/mimpi yang ingin dicapai terutama untuk kemajuan desa. Mimpi-mimpi masyarakat desa tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Mimpi masyarakat Desa Jolotigo berdasarkan FGD PLUP Tahun 2021

No	Harapan / Mimpi Warga Penggunaan Lahan Desa Jolotigo	Keterangan
1	Agrowisata	Karena Jolotigo potensial sekali wisatanya, ini pernah kami tembuskan
2	Wisata kebun kopi dan cengkeh	Simbar potensi kopi dan cengkeh, nanti harapannya wisata juga bisa menikmati hasil kopi dan teh itu sendiri
3	Bedugan Jolotigo	Semua titik terdapat taman rekreasi

2. Aset Wilayah Jolotigo

Untuk menilai kapasitas wilayah, dilakukan pemetaan aset desa sebagai modal sebuah wilayah dalam mengembangkan wilayahnya. Aset wilayah yang dipetakan mencakup 5 aset (aset pentagonal) yang mempengaruhi *livelihood* masyarakatnya. Kelima sumberdaya (aset pentagonal) tersebut mencakup: (i) Aset sumberdaya alam (SDA); (ii) Aset Sumberdaya Manusia (SDM); (iii) Aset Sumberdaya Buatan (SDB) atau Sarana-prasarana serta jaringan wilayah; (iv) Aset modal sosial (*social capital*); dan (v) Aset Sumberdaya ekonomi (SDE), mencakup komoditas barang dan jasa serta lembaga ekonomi.

Dalam konteks PLUP ini, aset yang dipetakan adalah aset wilayah (desa) yang sensitif (terpapar) terhadap perubahan iklim.

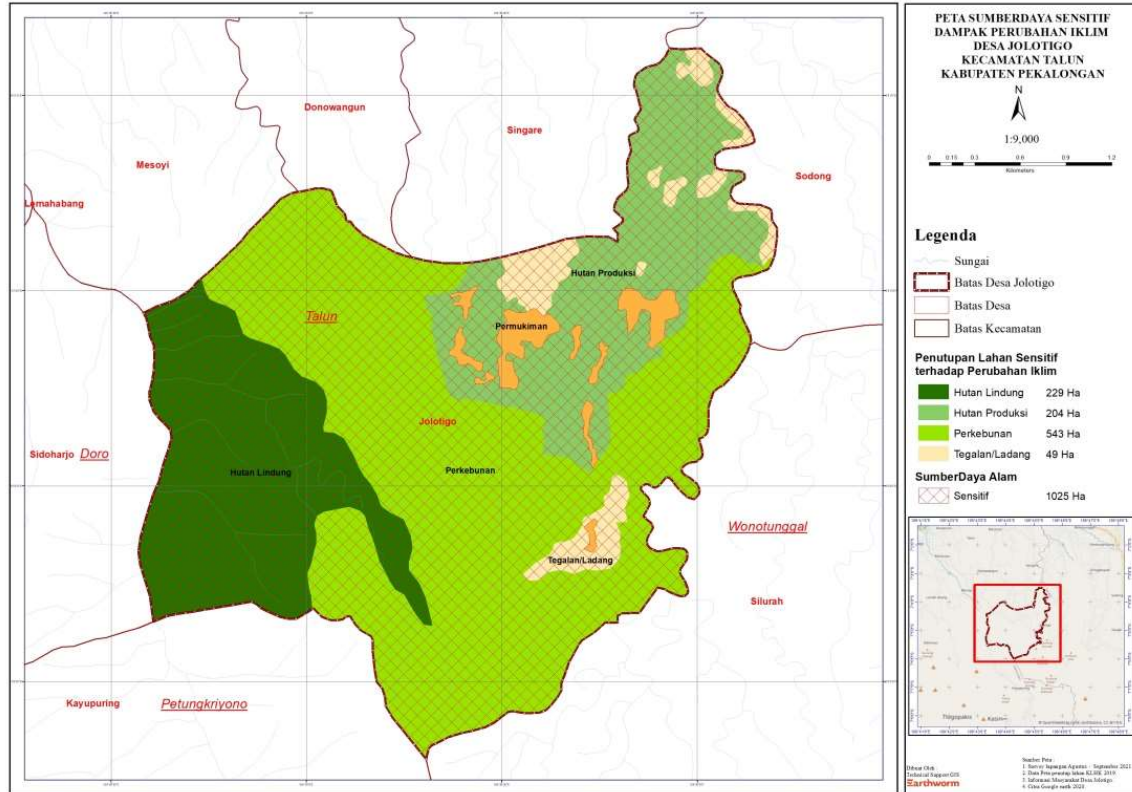
1. SUMBERDAYA ALAM DESA JOLOTIGO

Berdasarkan pemetaan sumberdaya alam yang dilakukan dalam PLUP diperoleh beberapa jenis sumberdaya alam yang ada di Desa Jolotigo diantaranya adalah sungai, hutan, sawah, ladang, dan air terjun. Berikut adalah tabel beberapa jenis sumberdaya alam yang sensitif terhadap perubahan iklim di Desa Jolotigo.

Tabel 3. Sumberdaya Alam Desa Jolotigo

No	Jenis sda	Lokasi	Keterangan
1	Sungai: Sumilir, Jolotigo, Kaliguwo, Kaliurang, Ngedok	Sumilir – Purbo, Jolotigo, Kaliurang, Ngedok, Kaliguwo-simba	Sebagai irigasi pertanian, Sebagai air bersih warga
2	Hutan	Purbo, Simbar, Kebun manis	Sebagian wilayah hutan dikelola masyarakat

3	Sawah	Semua Dukuh	Sebagai area pertanian dengan bermacam-macam jenis tanaman pangan
4	Ladang	Semua Dukuh	Tanaman keras/cengkeh, kopi, sengon dll
5	Air terjun	Purbo	Wisata



Gambar 5. Peta SDA sensitif terhadap perubahan iklim Desa Jolotigo

2. SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) DESA JOLOTIGO

Berdasarkan pemetaan PLUP, usia yang paling rentan terhadap perubahan iklim di Desa Jolotigo adalah balita dan lansia. Sedangkan jenis pekerjaan yang rentan terhadap perubahan iklim di Desa Jolotigo adalah petani, pedagang, buruh, penjahit, PNS, dan peternak. Petani sebagai jenis profesi yang paling terdampak terhadap perubahan iklim. Profesi kedua yang paling terdampak atas perubahan iklim adalah peternak. Kemudian jenis profesi yang rentan terhadap perubahan iklim adalah buruh, penjahit, pedagang, dan yang terakhir adalah PNS. Berikut adalah tabel jenis pekerjaan dan kelompok umur yang rentan terhadap perubahan iklim di Desa Jolotigo.

Tabel 4. Sumberdaya Manusia Desa Jolotigo

No	Jenis Pekerjaan / Keterampilan	Jumlah (Jiwa)	Lokasi	Keterangan
1	Petani	300	Semua dusun	Gagal panen
2	Pedagang	30	Semua dusun	Penghasilan tidak penentu
3	Buruh	150	Semua dusun	Kurangnya mata pencaharian
4	Penjahit	100	Semua dusun	
5	PNS	9	Semua dusun	
6	Peternak:			
	Peternak ayam petelur	8		
	Peternak kambing	200		
	Peternak sapi	150		
	Peternak kerbau	4		

3. SUMBERDAYA BUATAN DESA JOLOTIGO

Berdasarkan hasil pemetaan PLUP yang dilakukan di Desa Jolotigo menunjukkan bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana desa yang cukup mendukung aktivitas masyarakat seperti sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan lain-lain. Yang tersebar di masing-masing dukuh atau dusun dengan kondisi ada yang layak, rawan, dan rusak. Berikut adalah tabel sumberdaya buatan yang ada di Desa Jolotigo:

Tabel 5. Sumberdaya Buatan Desa Jolotigo

No	Jenis SDB	Jumlah (unit)	Kondisi	Lokasi	Keterangan
1	Jalan	5	Rusak	Jolotigo – Sengare	Milik pemda
2	Drainase	1	Tidak ada	Jolotigo – Sengare	Milik pemda
3	Tebing jalan	5	Rawan	Jolongo, Purbo, Simbar	Milik pemda/desa
4	Irigasi	3	Rusak	Jolotigo	
5	PAUD	2	Layak	Jolotigo, Purbo	
6	TK	2	Layak	Jolotigo, Purbo	Tergenang air dari irigasi yg rusak
7	SD	2	Layak	Jolotigo, Purbo	
8	Masjid	4	Layak	Jolotigo, Purbo	
9	Gereja	2	Layak	Purbo	
10	Madin	3	Layak	Jolong, Purbo	
11	Lapangan	2	Rusak	Purbo-Karyomukti	Butuh perbaikan
12	Lapangan	2	Tidak layak	Purbo-Karyomukti	Butuh dibangun

4. SUMBER DAYA SOSIAL (MODAL SOSIAL)

Berdasarkan pemetaan PLUP atas modal sosial masyarakat diperoleh 11 modal sosial yang ada di Desa Jolotigo. Ke 11 jenis modal sosial tersebut adalah PKK, jamaah tahlil, gotong royong, karangtaruna, ormas, musdes, kelompok tani, kelompok rebana, kelompok kesenian kuda lumping, jemaat gereja, dan angkatan muda gereja. Jenis-jenis modal sosial tersebut secara umum baik (aktif) bahkan keaktifannya hingga 100% yakni kelompok tani dan kelompok rebana. Berikut adalah tabel jenis modal sosial yang ada di Desa Jolotigo.

Tabel 6. Jenis Modal Sosial (MDS) Masyarakat Desa Jolotigo

No	Jenis modal sosial	Jumlah kelompok	Keaktifan (%)	Lokasi	Keterangan
1	PKK	2	25	Jolotigo, Purbo	Menjalin persatuan
2	Jama'ah tahlil	12	85	Semua Dukuh	Menjalin silaturahmi
3	Gotong royong		40	Dk. Purbo, Simbar	Kerjabakti lingkungan, Kerjabakti lainnya tiap dukuh ada
4	Karang taruna	1	75	Desa Jolotigo	Mempersatukan generasi muda
5	Ormas	1	95	Desa Jolotigo	Mempersatukan kegiatanm (informasi keagamaan)
6	Musdes	1	50	Desa Jolotigo	Merencanakan pembangunan desa
7	Kelompok tani	1	100	Dukuh. Purbo	Sedang membuat jalan ke area pertanian
8	Kelompok rebana	2	100		Sudah di buat royongan menjadi dua kelompok
9	Kelompok kesenian kuda lumping	1			Butuh modal
10	Jemaat gereja	2		Dukuh. Purbo	Adi Yusno
11	Angkatan muda gereja	5			Pemuda, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak

5. SUMBER DAYA EKONOMI (ASET EKONOMI MASYARAKAT)

Sumberdaya ekonomi yang dimaksud dalam PLUP adalah jenis barang atau komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan terdapat 15 komoditas pertanian dan 3 jenis komoditas peternakan yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Jolotigo. Komoditas tanaman pangan menempati 60% lebih ekonomi masyarakat, artinya sebagian besar penghasilan masyarakat bergantung dengan komoditas tersebut, dengan begitu sesuatu yang berpengaruh atau berdampak pada pertanian pangan akan mempengaruhi perekonomian masyarakat Desa Jolotigo. Berikut adalah data jenis komoditas yang diusahakan oleh masyarakat Desa Jolotigo:

Tabel 7. Jenis Komoditas (SDE) yang diusahakan masyarakat Desa Jolotigo

No	Jenis komoditas Hasil	Jumlah kapasitas produksi	Sat	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp) (x1000)	Dijual ke
1	Kopi	8	kg	20	160	Kering /pasar
2	Cengkeh	5	kg	24	120	Kering /pasar
3	Teh	72	kg	1.3	93.6	Pengepul
4	Jagung	25	kg	4.7	117.5	Pasar
5	Padi	22	kg	9	198	Subsisten
6	Pisang	5	kg	25	1.250.000	Pasar
7	Nanas	2.5	kg	10	25	Pengepul
8	Mlinjo	250	kg	2	500	Pasar
9	Jengkol	2	kg	9	18	Pasar
10	Kambing	600	ekor	1.500.000	900	Pengepul
11	Sapi	35	ekor	14.000.000	490	Pengepul
12	Alpukat	2	kg	30	60	Pengepul / online
13	Ayam	200	ekor	50	10	Konsumsi
14	Ketela	30	kg	700	21	Pasar
15	Ketimun	500	kg	8	4	Pasar
16	Sengon	720	kubik	400	28.8	Depo
17	Kapulaga	1	kg	75	75	Pasar
18	Salak	2	kg	6	12	Pasar
Total estimasi pendapatan/tahun masyarakat Desa Jolotigo					2.842.600	

Merujuk dari tabel di atas menunjukkan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat Desa Jolotigo adalah sebesar Rp. 2.842.600/tahun atau setiap kepala keluarga mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 26.000/KK/hari. Apabila dibandingkan dengan UMK Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 2.094.646¹⁰ atau Rp. 69.821/hari maka pendapatan rata-rata masyarakat Desa Jolotigo masih di bawah UMK Kabupaten Pekalongan.

Disamping pendapatan di atas masyarakat masih mendapatkan sumber pendapatan lain dengan cara bekerja di beberapa sektor seperti berdagang, buruh, dan pekerjaan serabutan lainnya. Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi jenis barang/komoditas yang dibeli (dikonsumsi) oleh masyarakat Jolotigo.

Tabel 8. Jenis Pengeluaran Kebutuhan Pokok Masyarakat Desa Jolotigo

No	Komoditas Konsumsi	Kapasitas beli	Satuan	Harga satuan	Total harga	Beli dari
				(Rp) (x1000)	(Rp) (x1000)	
1	Kebutuhan Urea:					Toko pertanian
	Teh	1000	Kg	3	3	Toko pertanian
	Padi	1500	Kg	3	4.5	Toko pertanian
	Jagung	1000	Kg	3	3	Toko pertanian
	Pisang	500	Kg	3	1.5	Toko pertanian
	Nanas	500	Kg	3	1.5	Toko pertanian
	Mlinjo	500	Kg	3	1.5	Toko pertanian
	Jengkol	500	Kg	3	1.5	Toko pertanian
2	Kebutuhan NPK:					Toko pertanian
	Teh	1000	Kg	10	10	Toko pertanian
	Padi	1000	Kg	10	10	Toko pertanian
	Jagung	1000	Kg	10	10	Toko pertanian
	Pisang	500	Kg	10	5	Toko pertanian
	Nanas	500	Kg	10	5	Toko pertanian
	Mlinjo	500	Kg	10	5	Toko pertanian
	Jengkol	500	Kg	10	5	Toko pertanian
3	Bibit kambing	100	Ekor	1.5	150	Peternak/Penjual

¹⁰ <https://pekalongan.suaramerdeka.com/pekalongan-raya/pr-1812040162/umk-tahun-2022-di-pekalongan-dan-sekitarnya-sudah-ditetapkan>

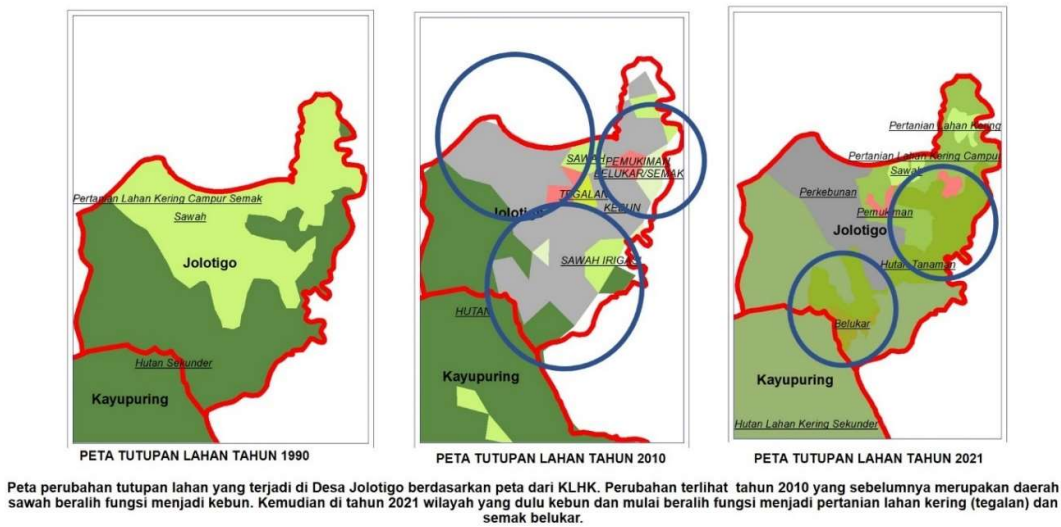
4	Sapi	11	Ekor	10	111	Peternak/Penjual
5	Kelinci	2000	Ekor	20	40	Peternak/Penjual
6	Alpukat	50	Batang	25	1.25	Warung
7	Mentimun	2	Bungkus	25	150	Warung
8	Lauk pauk				2.463.750	Warung
Total Pengeluaran Masyarakat Desa Jolotigo:					2.832.650	

Berdasarkan dari hasil perhitungan jenis barang yang dikonsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa total pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari yang mencakup kebutuhan urea, kebutuhan NPK, bibit kambing, sapi, kelinci, alpukat, mentimun, dan lauk pauk sekitar Rp. 2.832.650/tahun untuk 300 kepala keluarga atau Rp. 26.000/KK/hari. Apabila dibandingkan dengan perhitungan pendapatan rumah tangga petani maka pengeluaran ini dapat dikatakan pas-pasan.

3. Perubahan Tata Guna Lahan Desa Jolotigo

Berdasarkan analisis tutupan lahan wilayah Desa Jolotigo pada tahun 1990, 2010, dan 2021 menunjukkan bahwa perubahan paling banyak terjadi pada tutupan lahan sawah irigasi menjadi perkebunan/tegalan. Perubahan yang terjadi berikutnya adalah perubahan perkebunan/tegalan menjadi pertanian lahan kering. Hal ini menunjukkan pergeseran pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jolotigo. Berikut adalah peta perubahan lahan Desa Jolotigo tahun 1990, 2010, dan 2021.

PERUBAHAN PENUTUP LAHAN 1990 ,2010 DAN 2021 DI DESA JOLOTIGO



Gambar 6. Peta Perubahan Penutupan Lahan Desa Jolotigo

Sementara berdasarkan hasil analisa perubahan lahan pada tahun 1990, 2010, dan 2021 untuk jenis sumberdaya hutan sungai, hutan, sawah, ladang, dan air terjun menunjukkan perubahan yang tidak signifikan. Saat ini perubahan yang memicu perubahan lingkungan adalah pada jenis sumber daya ladang. Perubahan ini mengakibatkan berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Berikut adalah tabel perubahan sumberdaya alam di Desa Jolotigo.

Tabel 9. Perubahan Sumber Daya Alam

No	Jenis SDA	1990	2010	2021	Keterangan
1.	Sungai	Baik	Sedang	Rusak	Kering saat kemarau
2.	Hutan	Sangat baik	Sedang	Sangat baik	Banyak penghijauan
3.	Sawah	Sangat baik	Sedang	sedang	Ph Tanah rendah, tidak subur
4.	Ladang	Sangat baik	Sedang	Rusak	Ph tanah rendah, tidak subur
5.	Air Terjun (Bidadari, Muncar)	Baik	Baik	Baik	Menjadi baik karena dikelola untuk wisata

4. Permasalahan dan Isu Strategis Desa Jolotigo

1. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemetaan masalah dalam proses workshop PLUP diperoleh daftar masalah sebagai mana berikut.

- Erosi lahan
- Menurunnya hasil pertanian karena kekurangan air irigasi
- Produktivitas hasil panen rendah
- Lahan kurang produktif
- Hasil produkso pertanian rendah
- Perekonomian masyarakat tidak bisa berkembang
- Lahan semakin tidak subur
- Rendahnya produktivitas ternak
- Sulitnya pemasaran
- Harga rendah
- Jalan rusak
- Sulitnya transportasi kendaraan bermotor
- Menurunkan harga komoditas pertanian
- Kekurangan air pada lahan pertanian
- Mengandalkan lahan tadah hujan
- Usaha menggunakan listrik terhenti produksi
- Lemahnya perkembangan sektor peternakan, pertanian, dan UMKM
- Banyak usaha yang tidak memenuhi syarat perbankan

2. ISU STRATEGIS JOLOTIGO

Berdasarkan pengelompokan masalah, didapatkan isu strategis Desa Jolotigo sebagai berikut:

1. **Kurangnya pengetahuan tentang konservasi, pengetahuan dan ketrampilan budidaya pertanian dan peternakan**
 - Erosi lahan
 - Menurunnya hasil pertanian karena kekurangan air irigasi
 - Produktivitas hasil panen rendah
 - Lahan Kurang produktif
 - Hasil produksi pertanian rendah

- Perekonomian masyarakat tidak bisa berkembang
- Lahan semakin tidak subur

Kurang produktifnya wilayah hutan untuk perekonomian masyarakat

2. Terbatasnya jaringan pemasaran

- Rendahnya produktivitas ternak
- Sulitnya pemasaran
- Harga rendah

3. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kurang

- Jalan rusak
- Sulitnya transportasi kendaraan bermotor
- Menurunkan harga komoditas pertanian
- Kekurangan air pada lahan pertanian
- Mengandalkan lahan tadah hujan

Usaha menggunakan listrik terhenti produksi

4. Kurangnya akses permodalan

- Lemahnya perkembangan sektor peternakan, pertanian dan UMKM
- Banyak usaha yang tidak memenuhi syarat perbankan

2. PRIORITAS MASALAH

Dalam mendapatkan prioritas penanganan isu strategis di Desa Jolotigo, dilakukan analisis prioritas melalui skoring tingkat pengaruh/dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari masing-masing isu strategis yang diperoleh. Skoring tingkat pengaruh dibuat dengan menggunakan skala likert, 5, 4, 3, 2, dan 1, dimana masing skor bermakna:

- Skor 5, menunjukkan dampak sangat besar, dan mempengaruhi banyak orang
- Skor 4, menunjukkan dampak cukup besar, mempengaruhi banyak orang/banyak kelompok
- Skor 3, menunjukkan dampak sekitar 50% dari masyarakat/kelompok masyarakat
- Skor 2, menunjukkan dampak kecil/sedikit kelompok/orang
- Skor 1, menunjukkan dampak sangat kecil/ 1 kelompok masyarakat

Berdasarkan hasil pleno dan konsultasi hasil skoring diperoleh nilai sebagai berikut:

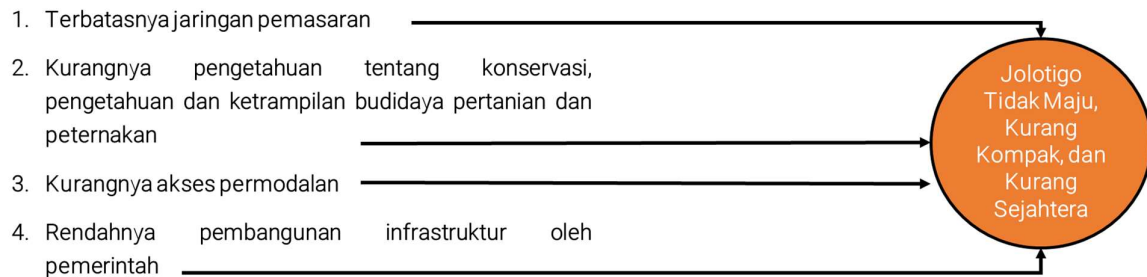
Tabel 10. Isu Strategis dan Skoring

No	Isu Strategis	Lingk.	Sosial	Ekonomi	Scor	Rank.
1	Pembangunan infratsruktur oleh pemerintah rendah	3	3	5	11	4
2	Terbatasnya jaringan pemasaran	4	4	5	13	1
3	Kurangnya pengetahuan tentang konservasi, pengetahuan dan ketrampilan budidaya pertanian dan peternakan	4	4	4	12	2
4	Kurangnya akses permodalan	3	4	5	12	3

Dari hasil skoring untuk isu strategis yang ada maka didapat urutan sebagai berikut:

1. Terbatasnya jaringan pemasaran
2. Kurangnya pengetahuan tentang konservasi, pengetahuan dan ketrampilan budidaya pertanian dan peternakan
3. Kurangnya akses permodalan
4. Rendahnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah

Dari urutan isu strategis di atas dapat dilihat pada diagamam berikut:



Gambar 7. Diagram Akar Masalah Desa Jolotigo

BAB IV ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN

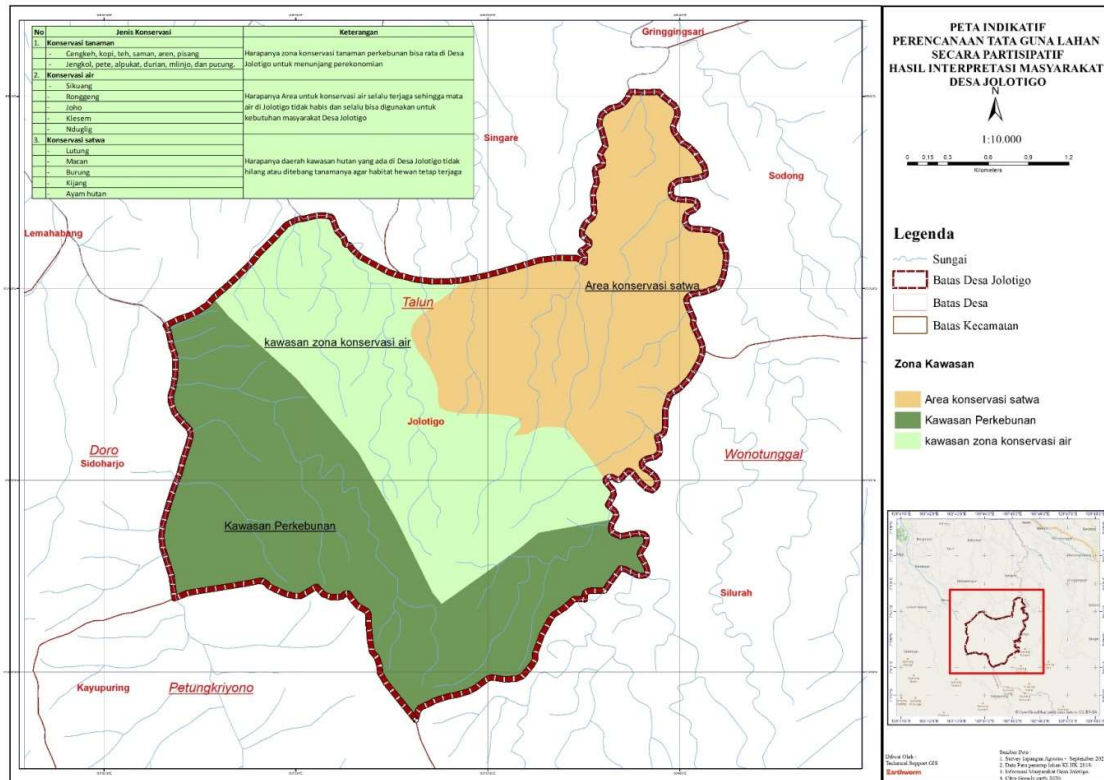
1. Zonasi Pengelolaan Wilayah Jolutigo

Memperhatikan atas visi PLUP, situasi tata guna lahan yang ada, perubahan tata guna lahan yang terjadi dari tahun ke tahun, serta akar masalah yang diperoleh, masyarakat menilai penting untuk ditentukannya zonasi pengelolaan, baik untuk fungsi lindung maupun budidaya. Zonasi pengelolaan ini kemudian menjadi arahan pemanfaatan lebih lanjut terhadap tata guna lahan desa sebagai bagian dari pemanfaatan atas ruang desa.

Merujuk pada 5 jenis sumberdaya alam yang dinilai penting, masing-masing diarahkan untuk fungsi lindung/pemanfaatan terbatas, yang mencakup, sungai, hutan dan air terjun. Sementara 2 jenis sumberdaya alam lainnya untuk fungsi budidaya, yakni sawah dan ladang.

Secara detail arahan pengelolaan untuk masing-masing jenis sumberdaya alam tersebut adalah:

1. Sungai, dimanfaatkan sebagai sarana pengairan, serta fungsi hidrologi menjaga keseimbangan hidrologis wilayah sebagai bagian dari DAS. Sehingga fungsi sungai adalah sebagai wilayah konservasi
2. Hutan, dimanfaatkan sebagai tujuan konservasi dimana hutan berfungsi sebagai pencegah degradasi lingkungan, serta perlindungan Kawasan yang mempengaruhi iklim makro dan mikro Kawasan. Selain itu juga sebagai sumber ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan penanaman dibawah tegakan
3. Sawah, sebagai wilayah yang menghasilkan sumber pangan masyarakat terutama padi
4. Ladang: Sebagai sumber budidaya tanaman pangan seperti padi lahan kering, jagung, kedelai, serta berbagai komoditas lainnya seperti cengkeh, kopi, dan pala
5. Air Terjun, dimanfaatkan sebagai fungsi pariwisata yang bisa menambah pendapatan masyarakat.



Gambar 8. Peta Zonasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Desa Jolotigo

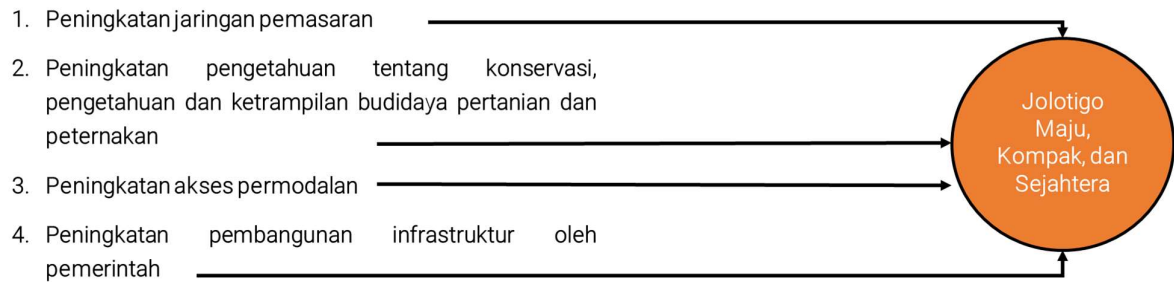
2. Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Jolotigo

Merujuk pada peta visi masyarakat Desa Jolotigo, dan 4 isu strategis yang disimpulkan dalam analisis masalah, maka dalam merumuskan arahan strategis pengembangan wilayah Desa Jolotigo merujuk (i) pencapaian visi PLUP; dan (ii) Arahan penyelesaian isu strategis, yang dirumuskan menjadi 4 arahan strategis pengembangan wilayah. Berikut adalah 4 arahan strategis pengembangan Desa Jolotigo, adalah:

1. Peningkatan jaringan pemasaran
2. Peningkatan pengetahuan tentang konservasi, pengetahuan dan ketrampilan budidaya pertanian dan peternakan
3. Peningkatan akses permodalan petani
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah

Terkait dengan upaya mendorong pemerintah Kabupaten agar menjadi kelestarian di Kawasan pegunungan, dinilai sebagai arahan strategis yang tidak berdampak langsung pada masyarakat Desa Jolotigo, sehingga perumusan arahan strategis yang dituangkan dalam bentuk program pengembangan wilayah Jolotigo yang disepakati menjadi empat arahan.

Pencapaian program dan/atau kegiatan atas 4 arahan strategis ini dinilai masyarakat dapat mewujudkan “Jolotigo maju, jaya, bisa, bersatu”. Berikut ini adalah diagram arahan strategis pengembangan wilayah Desa Jolotigo:



Gambar 9. Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Jolotigo

BAB V PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Program Strategis Pengembangan Desa Jolotigo

1. PROGRAM PENINGKATAN JARINGAN PEMASARAN

Program	Indikator	Target
Membuat jaringan pasar yang lebih mendekatkan antara produsen (petani) dengan pembeli langsung	- Terbangunnya sebuah lembaga pembantu pemasaran bagi produk petani - Terbangunnya budaya perdagangan yang fair antara produsen, dan konsumen	Minimal 50% petani masuk kedalam jaringan pasar yang berkeadilan

2. PORGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN KONSERVASI, KETRAMPILAN BUDIDAYA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Program	Indikator	Target
- Identifikasi jenis-jenis pelatihan yang dibutuhkan masyarakat petani - Melakukan pelatihan sesuai dengan hasil identifikasi masyarakat - Melakukan pendampingan atas implementasi pelatihan yang dilakukan	- Adanya list hasil identifikasi pelatihan yang diperlukan masyarakat - Terselenggaranya hasil pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat - Pendampingan implementasi hasil pelatihan	- Semua petani yang terlibat dalam pelatihan mempunyai ketrampilan dan pengetahuan yang meningkat - Semua petani yang ikut pelatihan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan
- Mengidentifikasi keperluan pupuk kandang - Membangun usaha pupuk kandang dengan kerjasama multi pihak	- Terdapat usaha pembuatan pupuk kandang yang bermutu dengan harga terjangkau	- Semua petani mampu mendapatkan pupuk kandang dengan harga terjangkau - Hasil pertanian semakin baik karena tanah semakin subur
- Menjalin komunikasi dengan Perhutani untuk pemanfaatan lahan dibawah tegakan - Menentukan jenis tanaman yang tepat untuk penanaman dibawah tegakan - Penerapan penanaman dibawah tegakan	- Terdapat kelompok tani yang bertanam dibawah tegakan - Terjalin hubungan harmonis dengan perhutani - Adanya komoditas yang sesuai dibawah tegakan	- Semua petani yang kekurangan lahan bisa memanfaatkan lahan dibawah tegakan - Terjalin hubungan harmonis antara masyarakat dan perhutani

- Identifikasi jenis tanaman yang memerlukan bibit unggul - Pembuatan bibit tanaman sesuai dengan kebutuhan	- Tersedianya bibit unggul untuk berbagai produk tanaman setempat - Bibit tersedia dengan harga terjangkau	- 100% petani mampu untuk mendapatkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan mereka
- Pembimbingan dan pendampingan teknik budidaya ternak sesuai dengan kebutuhan	- Peternak menerapkan teknik budidaya ternak dengan baik dan benar - Pertumbuhan individu ternak dan penambahan jumlah individu ternak signifikan	- 100% peternak mampu dan mau menerapkan budidaya yang baik, dan meningkatkan jumlah pendapatan dari usaha ternak
- Identifikasi permasalahan lahan kosong - Usaha pemanfaatan lahan kosong dengan berbagai model kerjasama yang bisa dilakukan	- Lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk berbagai model usaha budidaya tanaman dan lain sebagainya	- 50% lahan kosong bisa dimanfaatkan
- Mengidentifikasi kelompok masyarakat yang sering melakukan pembukaan hutan secara liar - Mengetahui secara rinci motif penebangan kawasan hutan - Bekerjasama dengan pihak terkait guna melakukan pencegahan penebangan hutan	- Teridentifikasinya masyarakat penebang hutan - Adanya pola pendekatan berdasarkan pengetahuan masalah yang mengakibatkan penebangan hutan liar - Terhentinya penebangan hutan liar	- Menurunkan 100% penebangan hutan liar

3. PROGRAM PENINGKATAN AKSES PERMODALAN PETANI

Akses kepada permodalan masih terbatas terutama kalangan petani dan pedagang. Hal ini dikarenakannya kurang pengetahuan terhadap cara mengakses sarana permodalan. Baik secara administrasi maupun kolateral yang memenuhi kaedah perbankan. Program tersebut yaitu:

Program	Indikator	Target
- Mencari lembaga yang bisa untuk melakukan memberikan akses permodalan kepada masyarakat - Sosialisasi tentang akses permodalan berserta syarat-syaratnya	- Adanya rencana fasum yang akan dibangun - Adanya dana yang diperuntukan untuk pembangunan fasum - Terbangunnya fasum sesuai rencana	- 100% Fasum terbangun sesuai dengan rencana dan bermanfaat bagi masyarakat

4. PROGRAM MENDORONG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Program	Indikator	Target
- Identifikasi titik–titik jalan yang akan dilakukan perbaikan - Persiapan perencanaan dan pendanaan perbaikan jalan	- Ada perencanaan perbaikan jalan dengan dukungan pendanaan yang jelas - Terjadi perbaikan pada ruas-ruas jalan yang dipetakan perlu diperbaiki	- 100% ruas jalan rusak telah diperbaiki sesuai dengan rencana
- Diskusi dengan pihak PLN tentang mengatasi kondisi yang ada - Alternatif penyediaan listrik dengan tenaga non fosil (matahari, mikrohidro)	- PLN bisa memberikan jalan keluar atas kondisi yang terjadi - Membuat perencanaan untuk mengatasi masalah	- Peluang listrik mati berkurang 50%
- Pengajuan ke pihak pemerintah untuk pengadaan program irigasi teknis	- Irigasi teknis terprogram dan terencana di wilayah tersebut - Adanya pembangunan irigasi teknis	- Sebagian besar kawasan pertanian di wilayah tersebut terairi dengan sistem irigasi teknis

Program Prioritas

Guna mempercepat kapasitas sosial-ekonomi masyarakat dalam beradaptasi perubahan iklim di Desa Jolotigo, perlu segera implementasi program/kegiatan yang menjadi prioritas masyarakat. Berikut adalah program prioritas tahun pertama Desa Jolotigo:

Peluang usaha dalam peningkatan kapasitas masyarakat adalah berbagai kegiatan ekonomi sesuai dengan identifikasi isu strategis dan program tersebut sangat mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat (kurang dari 1 tahun).

Adapun program prioritas pengembangan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk satu tahun kedepan Desa Jolotigo adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Program Prioritas Tahun Pertama Desa Jolotigo

No	Jenis Sumberdaya	Peluang usaha	Program
1	Pertanian	Kopi	- SDM dari pelaku industri kopi hulu hilir - SDA - Coffe shop - Sentra Robusta - Kopi bubuk - Pelatihan pengolahan kopi dan pendampingan pemasaran
		Cengkeh	- Produk cengkeh kering /basah - Tempat pengolahan daun cengkeh kering sebagai minyak atsiri
		Pisang dan alpukat	- Dijual dalam bentuk natura - Olahan pisang (sale, kripik, roti pisang) - Pemasaran hasil panen
		Teh	- Produk olahan dari teh berupa teh hitam dan teh hijau - Masker wajah dari teh - Teh celup/ teh bag
		Jagung	- Budidaya - Pengolahan jagung menjadi pakan ternak
		sayuran	- Budidaya buncis, cabai, mentimun, terong - Pendampingan pemasaran produk
2	Peternakan	Sapi kambing	- Teknik pengembangan - Penggemukan - Pengolahan pupuk organik - Penanaman rumput - Pembuatan pakan non hijauan
3	Air	Air	- Pengolahan air minum dalam kemasan - Sumber air melimpah

Program Yang Telah Dilakukan di Desa Jolotigo

Adapun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah banyak kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak dari perubahan iklim yang ada di Jolotigo. Sedangkan untuk program yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Program inisiasi desa, adalah program yang dibuat dalam rangka menyelesaikan masalah di desa yang dilakukan oleh desa tersebut. Adapun program inisiasi desa adalah:

Tabel 12. Program Inisiasi Masyarakat Desa

No	Program	Lokasi	Tahun
1	Embung mini	Dk. Purbo	2012
2	DAS (Dam penahan)	Ds. Jolotigo 4 titik	2018
3	Talud tebing	Dk. Purbo, Kartomukti, Jolotigo	2019, 2020 2018
4	Drainase	Dk. Simbar, Jolotigo, Karyomukti, Purbo	2010, 2011, 2016, 2017
5	Peresapan air	Dk. Purbo, Jolotigo	2017
6	Air bersih	Ds. Jolotigo 5 titik	2010
7	Penghijauan (pembibitan)	Ds. Jolotigo	2018
8	Irigasi	Ds. Jolotigo 3 titik	2017

Tim Penggerak Hasil PLUP

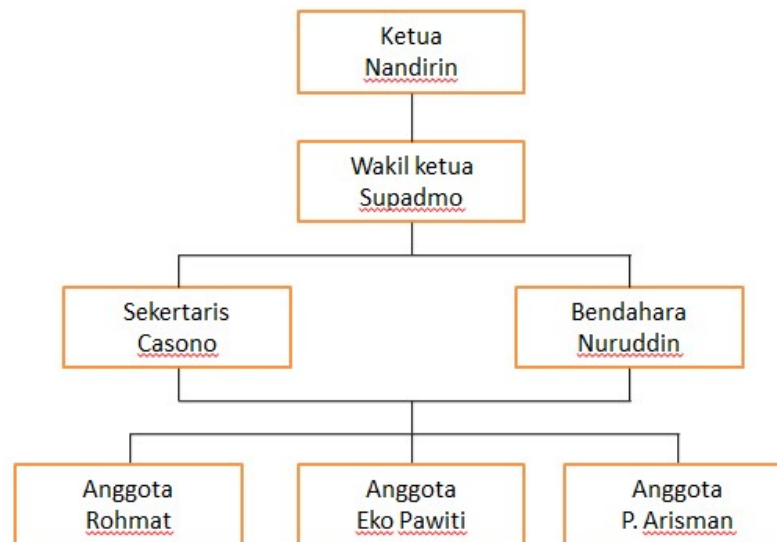
Untuk mewujudkan visi PLUP, arahan strategis pengembangan wilayah Jolotigo, mengawal usulan dan pelaksanaan program hasil PLUP, disepakati adanya Tim Penggerak Desa Jolotigo.

1. TUGAS INISIATOR

- Mampu dan sanggup menjadi sosok pengayom dan pemersatu semua lapisan dan anggota,
- Mampu dan sanggup menjadi aspirator lembaga bagi anggotanya,
- Mampu menjadi sosok inspirator bagi anggotanya,
- Mampu mengkoordinir anggotanya untuk mencapai tujuan bersama-sama,
- Berbagi informasi dan komunikatif ke anggota.

2. STRUKTUR INISIATOR DESA JOLOTIGO

Setelah melalui musyawarah terbentuklah tim inisiator desa dengan susuna sebagai berikut:



Gambar 10. Struktur Tim Inisiator Desa Jolotigo

LAMPIRAN

Daftar hadir *Field Facilitator* PLUP

Earthworm

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 14 Nov 2021
 Tempat : Lurah RT 0101
 Acara : FGD 2 Tlogothaplu

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	Susanti	anggota	gondang	[Signature]
2	IKASRI			[Signature]
3	Eka Margiyati			[Signature]
4	ROMDIYAH			[Signature]
5	Darmadi			[Signature]
6	TARMONO			[Signature]
7	KUSNOTO			[Signature]
8	Iwan			[Signature]
9	KASRO			[Signature]
10	Darmono			[Signature]
11	Purnanto			[Signature]
12	Turrah			[Signature]
13	Tandi			[Signature]
14	WALU			[Signature]
15	Winto			[Signature]
16	Jarmadi			[Signature]
17	Sugeng			[Signature]
18	Finur Yati			[Signature]
19	kasmay			[Signature]
20	Rendi			[Signature]
21	Sumiyati			[Signature]
23	KARTINEM			[Signature]
23	patonah			[Signature]
24	Yadi			[Signature]
25	Wardi			[Signature]

Foto Proses Workshop PLUP

